

Realisasi Anggaran Pemrov Papua Capai 62 Persen



Sumber: www.tribun-papua.com

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo mengatakan hingga triwulan II tahun 2022, realisasi anggaran telah mencapai 62 persen. Pihaknya optimis dengan sisa waktu enam bulan kedepan serta masih bergulirnya proyek fisik seperti pembangunan kantor gubernur serta gedung MRP, KPU dan Pengadaan Barang dan Jasa, realisasi dapat mencapai 100 persen.

“Kami bisa sampaikan angka presentasi grafik kami masih berjalan terus, sehingga kita optimis tahun ini target bisa tercapai hingga 100 persen,” terang Walilo di Jayapura, Senin.

Walilo juga berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih maksimal dalam menjalankan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meski sebenarnya, kinerja OPD sudah diatas 60 persen.

“Kami berharap hingga triwulan terakhir bisa mencapai di angka 80-90 persen baik dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah maupun realisasi anggarannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Walilo mengingatkan Kepala OPD untuk terus mengingatkan staf agar bekerja maksimal dalam mendorong realisasi dan capain kinerja di 2022 ini. Pemerintah Provinsi Papua mengklaim realisasi anggaran maupun kinerjanya hingga triwulan kedua tahun 2022 ini sudah mencapai 62 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan di Jayapura, Senin (4/7/2022). Menurut Walilo, angka realisasi anggaran maupun kinerja Pemprov Papua itu terungkap dari hasil monitoring meja yang dilakukan beberapa hari lalu.

“Dari monitoring meja itu kita baru sekitar 62 persen baik kinerja maupun realisasi anggaran, kalau monitoring lapangan belum dilakukan,” ungkapnya.

Ia mengakui, untuk kegiatan fisik yang dilakukan OPD teknis sejauh ini sudah ada yang berjalan, tapi ada pula yang masih dalam proses lelang.

“Contohnya pembangunan kantor Gubernur Papua dan tiga gedung kantor lainnya yang sudah jalan dan mencapai 70 persen, mungkin dalam tiga bulan kedepan sudah selesai. Sementara yang lain masih dalam proses lelang karena mekanismenya itu butuh waktu,” jelasnya.

Walilo berharap realisasi anggaran Pemprov Papua bisa mencapai angka 80 hingga 90 persen di triwulan keempat.

“Kami belum bisa sampaikan angka persentase yang pasti karena ini masih bergerak terus, hari ini sekian persen tapi besok sudah berubah lagi,” tandasnya.

Sumber berita:

1. *www.rri.co.id*, Realisasi Anggaran Pemprov Papua Capai 62 Persen di Triwulan II, 4 Juli 2022;
2. *www.portalpapua.pikiran-rakyat.com*, Realisasi Anggaran Pemprov Papua Capai 62 Persen, 7 Juli 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Hal ini akan mempermudah mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Proses pelaksanaan anggaran dan penatausahaan merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan yang juga sudah banyak mengalami perubahan. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini juga dalam praktiknya harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini juga harus didukung dengan adanya peningkatan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual.

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya terdapat tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain berbentuk

laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya. Laporan realisasi semester pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. transfer;
- d. surplus/defisit-LRA;
- e. pembiayaan; dan
- f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.